

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Konflik

Konflik sering dikaitkan dengan suatu tindakan yang berupa kerusuhan yang mengandung perbedaan perspektif atau asumsi dalam mengutarakan pendapat, bahkan persaingan, dan pertentangan antara kelompok, individu ataupun kelompok dengan individu. Interaksi yang terjadi antara manusia dalam masyarakat mempunyai potensi dapat mengakibatkan sebuah permasalahan, apabila dalam masyarakat tersebut memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Permasalahan yang ada dalam sebuah konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial atau sebuah proses sosial yang dimana dalam usahanya dapat memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan menggunakan berbagai ancaman atau bahkan menggunakan kekerasan.

Menurut Karl Marx dalam (Azzulfa, 2022), teori konflik merupakan suatu pertentangan yang muncul akibat terdapat perbedaan kelas dalam masyarakat. Karl Marx melihat konflik disebabkan adanya ketimpangan (*inequality*) dalam masyarakat, masyarakat yang kaya dan berkuasa berusaha mempertahankan kekuasaan dan kekayaannya dengan segala cara, terutama dengan menekan kelompok yang kurang berdaya. Premis dasar teori konflik menurut Karl Marx yakni bahwa individu atau kelompok dalam masyarakat

akan bekerja untuk mempertahankan kepentingan dan kekuasaannya, pada akhirnya akan timbul konflik antar kelas sosial. Teori konflik Karl Marx menyangkut empat teori dasar berikut ini:

- a. Struktur kelas dalam masyarakat
- b. Kepentingan ekonomi yang saling berlawanan di antara kelas yang berbeda
- c. Adanya pengaruh besar dipandang dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang
- d. Adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial

Konflik sendiri memiliki aspek baik dan buruk, konflik dapat menjadi sebuah wadah katalisator untuk mendorong terjadinya perubahan sosial, dan konflik tersebut dapat mewadahi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Aspek buruknya adalah permasalahan yang ada dalam sebuah konflik dapat menimbulkan malapetaka bagi kalangan masyarakat yang berkontroversi secara intens dan berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian atau rekonsiliasi.

Lewis A. Coser (1956) mengklasifikasikan konflik menjadi dua jenis, yaitu Konflik Realistis dan Konflik Non-Realistis (Wirawan, 2010).

1. **Konflik Realistis** terjadi akibat ketidakpuasan individu atau kelompok terhadap tuntutan tertentu dalam interaksi sosial. Konflik ini didasarkan pada perbedaan tujuan yang membuat satu pihak merasa dirugikan.
2. **Konflik Non-Realistis** bukan muncul karena tujuan yang antagonis atau skeptis, melainkan sebagai upaya meredakan ketegangan dalam salah satu pihak. Dengan kata lain, konflik ini dapat digunakan sebagai alat manipulasi oleh salah satu pihak yang terlibat untuk membuat konflik tampak samar atau bahkan mengarah pada penyelesaian.

Lewis A. Coser (dalam Andriatno, 2000:33) mendefinisikan konflik sebagai suatu bentuk perjuangan sosial yang muncul ketika kelompok-kelompok sosial, khususnya dari lapisan bawah, mulai mempertanyakan legitimasi distribusi sumber daya yang langka. Konflik, dalam hal ini, merupakan upaya perebutan nilai, status, dan kekuasaan yang dianggap langka. Proses ini bisa dinetralisasi, dilanjutkan, atau dieliminasi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Soerjono Soekanto (1995:107), konflik atau pertentangan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan cara menentang pihak lain, sering kali disertai ancaman atau tindakan kekerasan. Konflik terjadi ketika perbedaan-perbedaan yang ada—baik dari aspek fisik, emosional, budaya, maupun perilaku—semakin tajam dan disadari secara sosial.

Albert F. Eldridge (dalam Salahudin, t.t.) memandang konflik sebagai perbedaan ide, pandangan, paham, dan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik ini dapat bersifat non-fisik atau non-kekerasan, tetapi juga bisa berkembang menjadi bentuk kekerasan yang lebih intens.

Sementara itu, Dadan Juliantara (2011:164) mengklasifikasikan konflik sosial ke dalam dua bentuk utama: pertama, konflik antara kelompok masyarakat yang berbeda kelas sosial; kedua, konflik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Konflik dalam konteks ini dapat muncul karena kebijakan negara yang merugikan kelompok tertentu, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural dan mendorong munculnya perlawanan sosial.

Dalam pandangan Wahyudi (dalam Agus Suratna dan Taufiq Andrianto, 2001:4), mengacu pada analisis Ritzer, terdapat beberapa faktor utama penyebab konflik sosial:

1. Ketimpangan distribusi kekuasaan di masyarakat.
2. Penolakan individu terhadap sanksi dari pihak yang berkuasa.
3. Pertentangan kepentingan antara penguasa yang ingin mempertahankan posisinya dan kelompok tertindas yang menghendaki perubahan sebagai sarana perbaikan kondisi.

Ramlan Surbakti (1992:149) menjelaskan bahwa dalam ilmu politik, konflik sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan seperti kerusuhan,

kudeta, terorisme, dan revolusi. Namun, konflik juga bisa merujuk pada perdebatan, perbedaan pendapat, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok, atau pemerintah.

Eric Hoffer (dalam Urbaningrum, 1999:8) mengemukakan bahwa dorongan untuk perubahan dan keinginan memperoleh pengganti merupakan dua faktor logis yang membedakan antara konflik politik dan konflik sosial. Konflik politik, menurut Hoffer, merupakan bagian dari konflik sosial yang timbul akibat hubungan sosial yang intensif di dalam masyarakat. Berbeda dengan konflik sosial yang umumnya terkait isu-isu kebudayaan dan sosial kemasyarakatan, konflik politik menyangkut penguasa dan kebijakan yang dibuatnya.

Urbaningrum (1999:9) menambahkan bahwa konflik sosial biasanya tidak memiliki kaitan langsung dengan aspek politik, sedangkan konflik politik berakar pada perbedaan pandangan terhadap otoritas dan kebijakan negara. Konflik sosial berada dalam ranah sosial-kultural (societal), sedangkan konflik politik berada pada ranah kekuasaan (political).

Menurut Louis R. Pondy (dalam Urbaningrum, 1999:11), konflik mengalami perkembangan dinamis dan melalui lima tahapan:

1. **Konflik Laten:** Ditandai oleh persaingan atas sumber daya terbatas, perebutan kekuasaan, dan perbedaan tujuan antar kelompok.

2. **Konflik yang Disadari (Perceived Conflict):** Pihak-pihak mulai menyadari keterlibatan mereka dalam konflik.
3. **Konflik yang Dirasakan (Felt Conflict):** Konflik mulai menimbulkan respons emosional yang intens.
4. **Konflik Terbuka (Manifest Conflict):** Terwujud dalam bentuk interaksi terbuka, mulai dari perdebatan hingga kekerasan fisik. Hoffer menyoroti bahwa keinginan untuk perubahan dapat memicu konflik terbuka dalam bentuk gerakan massa.
5. **Dampak Konflik (Conflict Aftermath):** Tahap akhir dari suatu konflik, meskipun konflik dapat kembali muncul apabila resolusi yang ditempuh tidak memuaskan semua pihak.

Sedangkan menurut T.H. Handoko, konflik dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis:

1. **Konflik dalam Diri Individu:** Perbedaan internal akibat keunikan jasmani dan rohani individu.
2. **Konflik Antar Kelompok:** Perselisihan kepentingan antara dua kelompok atau lebih.
3. **Konflik antara Individu dan Kelompok:** Ketidaksesuaian tujuan antara individu dengan kelompoknya.

4. **Konflik Antar Kelas Sosial:** Ketimpangan sosial-ekonomi dan kegagalan sistem dalam distribusi fungsi sosial.
5. **Konflik Internasional:** Ketegangan antar negara akibat perbedaan kebijakan, sistem, dan kepentingan nasional.

2.1.2. Konflik Sumber Daya Alam

Konflik dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Menurut teori konflik, masyarakat terdiri dari beragam kelompok yang saling bersaing secara intens untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang terbatas. Walaupun di permukaan tampak adanya kerja sama atau aliansi, sebenarnya terdapat dinamika perebutan kekuasaan yang berlangsung secara tersembunyi (James, 2007) Persaingan atas sumber daya ini menjadi arena perebutan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Konflik semacam ini dapat terjadi pada empat level, yakni antar individu, antar komunitas, dalam masyarakat secara luas, dan antar negara. Sementara itu, menurut Abiodun Alao (2007), konflik terkait sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi lima tingkat, yaitu, antara komunitas atau kelompok dengan negara, antar komunitas atau kelompok, antara komunitas dan pemerintah, antara komunitas dan perusahaan multinasional, serta antar institusi pemerintahan.

Menurut Abiodun Alao, terdapat tiga cara dalam mengaitkan sumber daya alam dengan konflik, yaitu sebagai pemicu konflik, sebagai elemen yang memperpanjang konflik, dan sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam

konteks sebagai pemicu konflik, terdapat tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, berkaitan dengan jumlah dan mutu ketersediaan sumber daya. Fokusnya adalah pada seberapa besar dan seberapa baik kualitas sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan permintaan yang ada, yang dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konflik akibat kelangkaan. Kedua, aspek politik, pengelolaan, dan kontrol atas sumber daya alam, di mana keterlibatan negara dalam mengatur sumber daya sering kali memunculkan persoalan yang berujung pada konflik. Ketiga, adalah kerumitan dalam proses ekstraksi, yaitu metode untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Proses ini sering menarik perhatian dari organisasi non-pemerintah, baik lokal maupun internasional, karena berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Tabel 2.1. Sumber Daya Alam dan Penyebab Konflik

Sumber daya berdasarkan penyebab konflik	Manifestasi sumber daya	Manifestasi konflik
Ketersediaan secara kualitas dan kuantitas	1) Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tekanan terhadap pemerintah mendorong pengambilan kebijakan yang agresif demi memperoleh sumber daya alternatif.
	2) Kelangkaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok elit menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk memanipulasi distribusi sumber daya demi keuntungan mereka sendiri. • Ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat berpotensi menyebabkan perpecahan.

Mekanisme manajemen		<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan cenderung menjadi otoriter untuk meredam protes dari masyarakat. • Kelompok-kelompok saling bersaing untuk bertahan hidup di tengah kelangkaan sumber daya. • Penurunan kualitas hidup atau lingkungan memicu ketegangan sosial.
	3) Kelimpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mismanajemen terhadap sumber daya alam yang berlimpah dapat menimbulkan konflik. • Munculnya berbagai kelompok dengan kepentingan berbeda yang berupaya menguasai sumber daya alam..
	1) Kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketegangan meningkat akibat perebutan hak atas kepemilikan sumber daya.
	2) Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Tudingan tentang ketidakadilan dalam pembagian sumber daya semakin memperparah situasi.
	3) Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> • Dugaan adanya kebijakan yang hanya menguntungkan wilayah atau kelompok tertentu.
	4) Alokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses dan kualitas lingkungan yang tidak merata menciptakan ketimpangan. • Ketidakseimbangan dalam proses penerimaan atau pembagian hasil.
	5) Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya dari pihak tertentu untuk merebut atau mempertahankan kendali dari kelompok lain. • Penguasaan sumber daya digunakan sebagai sumber

		pendanaan untuk konflik bersenjata. <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya dapat dijadikan alat untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai agar berdamai.
		<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemulihan atau pergantian kekuasaan sering kali memicu konflik baru.
Proses Ekstraksi	1) Eksplorasi	
	2) Eksploitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Eksploitasi sumber daya membawa dampak dan risiko terhadap lingkungan. • Sistem kepemilikan lahan dapat menjadi sumber sengketa atau konflik kepentingan.

Sumber: Abiodun Alao, Natural Resources and Conflict in Africa: The Tragedy of Endowment, (New York: University of Rochester Press, 2007).

Sumber daya alam berperan dalam memperpanjang konflik, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus di Afrika. Pertama, konflik sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, eskalasi perang sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya alam, yang pada akhirnya menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Ketiga, minimnya kemauan untuk berkompromi menghambat upaya perdamaian. Keempat, konflik diperparah oleh meningkatnya peran aktor lokal. Kelima, terdapat berbagai kepentingan dan campur tangan dari pihak luar, termasuk negara tetangga, tentara bayaran, serta aktor-aktor internasional, khususnya perusahaan multinasional.

Dalam upaya penyelesaian konflik, sumber daya alam memainkan peran penting yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, sumber daya alam sebagai pemicu konflik. Dalam hal ini, penyelesaian konflik harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak yang terlibat, dilakukan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan. Kedua, tingkat kerusakan sumber daya alam akibat konflik menjadi pertimbangan penting. Ketika konflik menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, resolusi konflik juga perlu difokuskan pada upaya pemulihan dan perbaikan lingkungan. Ketiga, keterlibatan pihak luar sebagai mediator. Peran aktor eksternal sangat signifikan dalam proses resolusi, terutama jika mereka memiliki kapasitas untuk membatasi atau mengatur pengelolaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang sedang berseteru.

Menurut Abiodun Alao, tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai penting. Tanah kerap dianggap sebagai aset berharga yang harus dijaga demi kepentingan generasi mendatang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika konflik sering muncul akibat perebutan terhadap sumber daya ini. Sengketa yang berkaitan dengan tanah umumnya berakar pada isu kepemilikan, pengelolaan, dan penguasaan Masalah konflik lahan sangat berkaitan dengan isu kelangkaan. Kelangkaan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelangkaan alami dan kelangkaan buatan. Kelangkaan alami muncul akibat pertumbuhan penduduk yang berlebihan atau faktor lingkungan yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara

jumlah penduduk dan ketersediaan lahan. Sementara itu, kelangkaan buatan terjadi karena faktor-faktor seperti migrasi, perampasan lahan, kelebihan jumlah penduduk, serta menyusutnya lahan untuk pertanian dan permukiman. Sering kali, kelangkaan buatan dipicu oleh tindakan elit politik yang berupaya menguasai lahan demi kepentingan pribadi, dengan memanfaatkan hukum atau konstitusi untuk mengambil alih tanah milik masyarakat lokal.

Lahan yang mengandung sumber daya mineral sering menjadi objek perebutan berbagai pihak berkepentingan, yang pada akhirnya memicu konflik. Kekayaan mineral pada suatu wilayah menarik perhatian banyak aktor, seperti pelaku bisnis internasional, militer, elit politik, kelompok kriminal, organisasi masyarakat sipil baik lokal maupun global, hingga perusahaan multinasional yang ingin memperoleh keuntungan. Konflik akibat kekayaan mineral umumnya dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, kekayaan mineral yang besar mendorong munculnya klaim dari berbagai komunitas, kelompok etnis, atau bahkan negara. Kedua, munculnya perlawanan atau protes keras dari masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan yang diterapkan pemerintah. Ketiga, terbentuknya aliansi politik yang justru mengganggu kestabilan dan aktivitas masyarakat di tingkat lokal.

3) Ekologi Politik

Kajian ekologi politik menempatkan analisis politik sebagai faktor utama dalam memahami interaksi antara manusia dan lingkungan, terutama dalam kaitannya dengan penyebaran degradasi lingkungan. Pendekatan ini

menyoroti bagaimana dinamika ekonomi politik mempengaruhi perubahan lingkungan. Dalam konteks negara-negara Dunia Ketiga, terdapat beberapa pendekatan ekologi politik, yaitu (Bryant & Bailey, 2005) :

a) Pendekatan berbasis penelitian dan analisis ekologi politik

Pendekatan ini berfokus pada berbagai permasalahan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek geografis yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, khususnya dalam kaitannya dengan ekonomi politik.

b) Pendekatan berbasis ekonomi politik

Pendekatan ini mempertanyakan kondisi ekonomi politik yang memengaruhi lingkungan. Tujuannya adalah memahami konsep pembangunan, berbagai aktor yang terlibat, serta bagaimana wacana tertentu dapat mendukung atau menghambat kepentingan aktor-aktor tersebut. Contoh yang sering digunakan adalah pembangunan berkelanjutan, risiko bencana, kerentanan lingkungan, serta wacana kehutanan.

c) Pendekatan geografis

Pendekatan ini menitikberatkan analisis permasalahan lingkungan dalam konteks spasial atau keruangan suatu wilayah.

d) Pendekatan sosial-ekonomi

Pendekatan ini menghubungkan faktor ekologi politik dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas sosial, etnisitas, dan gender. Ketimpangan sosial, termasuk dominasi kelas tertentu, diskriminasi gender, dan marginalisasi kelompok etnis minoritas, memiliki keterkaitan erat dengan isu lingkungan.

e) Pendekatan aktor dan konflik

Pendekatan ini berfokus pada kepentingan, karakter, serta tindakan berbagai aktor dalam konflik ekologi politik. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa konflik atau kerja sama dalam persoalan lingkungan merupakan hasil dari interaksi antar aktor yang berbeda, serta menghubungkan mereka dengan dinamika ekologi politik yang terjadi.

Dalam buku *Third World Political Ecology* , Raymond L. Bryant dan Sinead Bailey (2005) menyoroti pentingnya peran politik berbagai aktor dalam interaksi antara manusia dan lingkungan di negara-negara Dunia Ketiga. Pendekatan ini menawarkan keuntungan seperti memungkinkan penelitian empiris di tingkat lokal dalam perspektif teoritis dan perbandingan, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait motivasi, kepentingan, serta tindakan aktor, serta menekankan dinamika interaksi antaraktor dalam konflik ekologi politik di negara-negara berkembang.

2.1.3. Resolusi Konflik

Menurut Simon Fisher dkk. (2001:19), resolusi konflik adalah upaya untuk menangani penyebab konflik dan membangun hubungan yang adil dan berkelanjutan di antara pihak-pihak yang berselisih. Resolusi konflik bertujuan tidak hanya mengakhiri kekerasan, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan melalui pendekatan strategis dan negosiasi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam proses resolusi konflik. Menurut James E. Anderson (dalam Riwu Kaho & Haryanto, t.t.:8–9), setidaknya terdapat tujuh fungsi penting pemerintah dalam konteks ini:

1. Menyediakan infrastruktur ekonomi dan aturan main yang jelas.
2. Menyediakan barang dan jasa publik.
3. Menjembatani konflik dalam masyarakat untuk menjamin ketertiban.
4. Menjaga persaingan ekonomi yang sehat.
5. Melindungi sumber daya alam.
6. Menjamin akses minimum terhadap barang dan jasa bagi setiap warga.
7. Menjaga stabilitas ekonomi secara umum.

2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki (1993), implementasi mencakup berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mewujudkan suatu program. Pada tahap ini,

pihak eksekutif bertugas mengelola proses pengorganisasian, penafsiran, dan penerapan kebijakan yang telah dipilih. Dengan melakukan pengorganisasian, eksekutif dapat mengelola sumber daya, unit kerja, dan metode yang mendukung pelaksanaan program secara efektif dan efisien, sekaligus menerjemahkan rencana yang telah disusun menjadi petunjuk yang jelas dan mudah diikuti guna mendukung keberhasilan program.

Dengan demikian, tahap implementasi merujuk pada proses yang berlangsung setelah suatu undang-undang disahkan, dimana kebijakan diberi kekuatan hukum dan diarahkan untuk menghasilkan keluaran yang konkret dan terukur. Oleh karena itu, implementasi kebijakan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan-tujuan kebijakan dengan pencapaiannya melalui berbagai kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah (Tangkilisan, 2003).

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood, implementasi kebijakan berkaitan dengan kemampuan untuk mengevaluasi permasalahan secara tepat, lalu mengubahnya menjadi keputusan-keputusan yang bersifat spesifik dan operasional (Tangkilisan, 2003).

Menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi merupakan proses interaksi antara penetapan tujuan dan penggunaan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, implementasi mencerminkan kemampuan untuk mengaitkan tujuan yang ingin dicapai

dengan langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk mencapainya (Tangkilisan, 2003).

Jones (1977) membahas permasalahan implementasi kebijakan dengan mengacu pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional. Ia mengidentifikasi berbagai dimensi dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang telah disetujui, serta menetapkan aspek-aspek implementasinya. Selain itu, Jones juga menyoroti para pelaku yang terlibat dalam proses tersebut, dengan penekanan khusus pada peran birokrasi sebagai lembaga pelaksana.

Jadi Implementasi adalah proses yang bersifat dinamis, yang secara berkelanjutan melibatkan upaya untuk menemukan tindakan yang mungkin dan dapat dilakukan. Oleh karena itu, implementasi mencakup pengaturan berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mewujudkan program sesuai dengan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan, kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan para pelaksana, karena terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi jalannya proses implementasi tersebut.

Menurut George C. Edward III yang dikutip dalam Subarsono (2005), terdapat empat variabel utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini memiliki keterkaitan dan saling memengaruhi dalam proses implementasi.

1) Komunikasi

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan menuntut agar para pelaksana memahami dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus disampaikan secara efektif kepada kelompok sasaran agar dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam implementasi. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak disosialisasikan dengan baik atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok yang dituju, maka potensi penolakan dari mereka akan semakin besar.

2) Sumber daya

Meskipun kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan berjalan secara optimal jika para implementor kekurangan sumber daya. Sumber daya ini mencakup tenaga manusia, seperti kemampuan dan keahlian pelaksana, serta dukungan dana. Sumber daya merupakan elemen krusial agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa adanya dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa realisasi.

3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap dan karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, termasuk sejauh mana komitmen mereka terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika implementor memiliki disposisi yang positif, mereka

cenderung mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika disposisi ini tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan berpotensi menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasinya. Salah satu elemen penting dalam struktur tersebut adalah keberadaan prosedur operasional standar (SOP), yang bersama dengan kejelasan dasar hukum, menjadi acuan bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Namun, jika struktur organisasi terlalu berlapis atau panjang, hal ini dapat menghambat proses pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Akibatnya, fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan organisasi menjadi terbatas.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat dikatakan sebagai pemahaman mendasar yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta sebagai fondasi bagi para peneliti untuk membentuk proses keseluruhan dalam penelitian. Sehingga kerangka pemikiran diharapkan menjadi landasan yang mampu membantu peneliti dalam menyusun sebuah gambaran atau konsep yang akan diteliti, dikaji, hingga disajikan dalam sebuah penelitian nantinya.

KHDPK sebagai bentuk transformasi pengelolaan lahan hutan berdampak kepada bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan adanya kebijakan ini legalitas pengelolaan lahan hutan dibagi dalam dua bentuk skema, yaitu Perhutanan Sosial yang dikelola oleh Kementerian dan masyarakat dan KKP/KKPP yang dikelola oleh Perhutani dan masyarakat.

Pada proses analisis implementasi kebijakan peneliti mencoba melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kualitas dari implementasi kebijakan itu sendiri, sehingga dapat disintesis kepada bentuk analisis potensi konflik yang dimulai dari identifikasi penyebab konflik sumber daya alam dan dilanjutkan kepada analisis ekologi politik yang didalamnya terdapat dua sub analisis.

Dalam melihat apa yang menjadi pemicu pada proses konflik yang terjadi , peneliti menggunakan teori mengenai penyebab konflik sumber daya alam yang digagas oleh Abiodun Alao.

Sementara untuk melihat potensi konflik secara keseluruhan peneliti menggunakan ekologi politik yang didalamnya terdiri dari analisis ekonomi politik serta pola dan karakter konflik. Sehingga dapat mengetahui karakter serta kepentingan dari tiap aktor dan memahami pola yang terjadi.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran